

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI OLEH PEMERINTAH DESA
GUNUNG KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI DALAM
PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN
REGULASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55
TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

Yogi Anggara Fiqi Saputra

6661170076

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG 2024**

PROGAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : YOGI ANGGARA FIQI SAPUTRA
NIM : 6661170076
Judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI OLEH PEMERINTAH
Skripsi : DESA GUNUNG, KECAMATAN SIMO, KABUPATEN
BOYOLALI DALAM PENINGKATAN TARAF
KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN REGULASI
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55 TAHUN
2019 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI PROVINSI JAWA
TENGAH

Telah Diuji di Hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 27 Juni
2024 dan dinyatakan LULUS.

Serang, Juli 2024

Ketua Penguji
Listyaningsih, M.Si
NIP.197603292003122001


.....

Anggota :
Dr. Riny Handayani, M.Si
NIP.197601062006042007


.....

Anggota :
Riswanda, S.Sos., M.Pa, Ph.D
NIP. 198104122008121001

Mengetahui,

.....

Dekan Fisip Untirta

Leo Agostino, Ph.D.
NIP.197408032003121001

Ketua Program Studi
Administrasi Publik

Dr. Rina Yulianti, S.I.P., M.Si
NIP. 197407052006042011

LEMBAR PERSETUJUAN

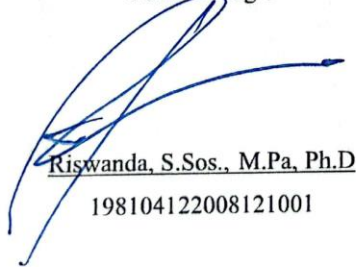
Nama : Yogi Anggara Fiqi Saputra
Nim : 6661170076
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung,
Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf
Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan
Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa
Tengah

Serang, 07 Mei 2024

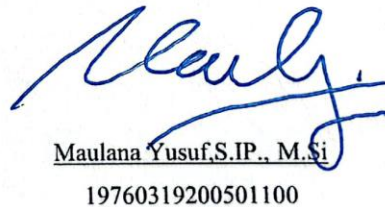
Skripsi Ini Telah Disetujui Untuk Disajikan

Menyetujui

Pembimbing 1


Riswanda, S.Sos., M.Pa, Ph.D
198104122008121001

Pembimbing 2


Maulana Yusuf, S.IP., M.Si
19760319200501100

Mengetahui

Ketua Prodi Administrasi Publik



Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si
197407052006042011

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yogi Anggara Fiqi Saputra
NIM : 6661170076
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 18 Februari 1999
Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI OLEH PEMERINTAH DESA GUNUNG KECAMATAN SIMO KABUPATEN BOYOLALI DALAM PENINGKATAN TARAF KESEJAHTERAAN PETANI BERDASARKAN REGULASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG PERENCANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANI PROVINSI JAWA TENGAH** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar kesarjanaan saya bisa dicabut.

Serang, 07 Mei 2024



Yogi Anggara Fiqi Saputra

MOTTO

Hal yang terhebat dari waktu adalah ia terus berputar sederhana, jika bukan hari ini maka esok akan datang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Srata (S1) Administrasi Publik.

Penulisan skripsi ini, peneliti telah banyak dibantu oleh berbagai pihak yang telah memberikan bantak waktu dan tenaga. Peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sedalam-dalamnya dengan sangat tulus dengan berbagai pihak antara lain:

1. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T., selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Leo Agustino, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Dr. Nurprati W. Widyastuti, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Listyaningsih, S.Sos, M.Si, selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Ika Ariana Indriyani, S.IP., M.A. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

6. Dr. Rina Yulianti, S.IP., M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Dr. Julianes Cadith, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
8. Rahmawati, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing mulai dari awal perkuliahan.
9. Riswanda, S.Sos., M.Pa, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Maulana Yusuf, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini maka dari itu peneliti membutuhkan kritik dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik.

Serang, 07 Mei 2024

Yogi Anggara FS

ABSTRAK

YOGI ANGGARA FIQI SAPUTRA. NIM. 6661170076. Skripsi. Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, 2024. Pembimbing I: Riswanda, S.Sos., M.Pa, Ph.D dan Pembimbing II: Maulana Yusuf, S.I.P., M.Si.

Desa Gunung di Kecamatan Simo merupakan daerah yang mempunyai luas panen yang rendah dibandingkan desa lainnya. Tercatat dari laman resmi sumber statistik Kabupaten Simo dari dinas penyuluhan pertanian Kabupaten Simo, Desa Gunung memiliki luas panen sebesar 221 (Ha) pada tahun 2020 padahal jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani jauh lebih besar dibandingkan desa lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Petani yang Dilakukan Pemerintah Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Dalam Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Petani Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Usahatani Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali belum sepenuhnya melaksanakan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Petani di Provinsi Jawa Tengah. Namun pemerintah daerah juga harus meningkatkan perannya dalam melaksanakan Pergub tersebut agar taraf hidup petani di Jawa Tengah, khususnya di Desa Pegunungan, dapat semakin meningkat.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Petani

ABSTRACT

YOGI ANGGARA FIQI SAPUTRA. NIM. 6661170076. Thesis. Empowerment Of The Farming Community By The Gunung Village Government, Simo District, Boyolali Regency In Increasing The Level Of Farmers' Welfare Based On The Regulation Of The Governor Of Central Java Regulation No 55 Of 2019 Concerning Planning For The Protection And Empowerment Of The Farming Community Of Central Java Province. Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University, Serang, 2024. First Supervisor: Riswanda, S.Sos., M.Pa, Ph.D and Second Supervisor: Maulana Yusuf, S.I.P., M.Si.

Gunung Village in Simo District is an area that has a low harvested area compared to other villages. It is recorded from the official page in the Simo District statistics source from the Simo District agricultural extension agency, that Gunung Village has a harvested area of 221 (Ha) in 2020 even though the population is working as farmers is much greater than in other villages.

This research aims to determine the Empowerment of Farming Communities by the Government of Gunung Village, Simo District, Boyolali Regency in Increasing the Level of Farmers' Welfare Based on Central Java Governor Regulation No. 55 of 2019 concerning Planning for the Protection and Empowerment of Farming Communities in Central Java Province.

The method used in this research is a case study with a descriptive qualitative research approach. Data collection techniques include observation, interviews and documentation.

The results of this research indicate that the Gunung Village Government, Simo District, Boyolali Regency has not fully implemented Central Java Governor Regulation No. 55 of 2019 concerning Planning for the Protection and Empowerment of Farming Communities in Central Java Province. However, the regional government must also increase its role in implementing the Governor's Regulation so that the standard of living of farmers in Central Java, especially in Mountain Village, can improve further.

Keywords: Community Empowerment, Village Government, Farmers

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penulisan	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA PEMIKIRAN DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	13
2.1 Pemberdayaan Masyarakat.....	13
2.1.1 Konsep Pemberdayaan	13
2.1.2 Proses Pemberdayaan	14
2.2 Pemerintah Desa.....	25
2.2.1 Konsep Pemerintah.....	25
2.2.2 Pemerintahan Desa	26
2.2.3 Tugas Pokok Pemerintahan	30
2.3 Penelitian Terdahulu.....	31
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian	40
2.5 Asumsi Dasar	41

BAB III METODE PENELITIAN.....	43
3.1. Pendekatan Metode Penelitian	43
3.2. Fokus Penelitian	43
3.3. Lokasi Penelitian	45
3.4. Variabel penelitian.....	45
3.5. Instrumen Penelitian.....	47
3.6. Informan Penelitian	47
3.7. Teknik Pengumpulan Data	49
3.8. Analisis Data	50
3.9. Validitas Data	53
3.10. Jadwal Penelitian	53
BAB IV HASIL PENELITIAN	55
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	55
4.2. Deskripsi Data	64
4.3. Penyajian Data.....	66
4.4. Pembahasan	91
BAB V PENUTUP.....	102
5.1. Simpulan.....	102
5.2. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022	4
Tabel 1. 2 Luas panen padi sawah menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali	5
Tabel 3. 1 Informan Penelitian.....	48
Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian.....	53
Tabel 4. 1 Penyebaran Penduduk Desa Gunung	56
Tabel 4. 2 Sektor Peternakan di Desa Gunung	59
Tabel 4. 3 Sektor Perikanan di Desa Gunung	60
Tabel 4. 4 Sumber Daya Manusia Kelompok Tani Desa Gunung	61
Tabel 4. 5 Informan Penelitian.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Penelitian	41
Gambar 4. 1 Peta Desa Gunung	57
Gambar 4. 2 Pembahasan Hasil Penelitian	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	107
Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Narasumber	112
Lampiran 3 Surat Pernyataan Narasumber	130
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	135

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah usaha yang dilakukan untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pembangunan Nasional yang berwawasan hukum didasarkan pada prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang mencakup pembangunan sistem hukum, perancangan kebijakan hukum umum, penyelenggaraan negara yang berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Tujuan utama dari Pembangunan Nasional adalah membangun kemandirian (Widjaya, 2003).

Pembangunan dalam konteks ini merupakan proses mewujudkan cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata. Sistem otonomi daerah yang dianut saat ini memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola kebutuhan serta sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Pembangunan nasional berwawasan hukum berlandaskan prinsip negara hukum dan wawasan hukum yang meliputi pembangunan sistem hukum, rancangan umum kebijakan hukum, penyelenggaraan negara berwawasan hukum, dan orientasi norma hukum. Orientasi penegakannya harus memenuhi syarat materi hukum dan aparat hukum. Pembaruan materi hukum nasional harus sesuai dengan zaman dan perkembangan nilai-nilai keadilan masyarakat, termasuk masyarakat desa di bidang pertanian, dengan berbagai regulasi yang mendukungnya.

Salah satu regulasi pemerintah yaitu Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal 1 BAB I yang menyebutkan bahwa Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.

Mengakui bahwa sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada sektor pertanian, perbaikan sektor ini menjadi pusat dalam mewujudkan pertanian yang tangguh. Strategi pembangunan di bidang pertanian harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada, salah satunya adalah masalah sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia dalam pembangunan nasional sangat penting, terutama terkait dengan motto pembangunan yang demokratis: pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Data empiris menunjukkan bahwa kekayaan sumber daya alam suatu negara tanpa diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai tidak akan menghasilkan pembangunan yang optimal. Sebaliknya, negara dengan sumber daya manusia yang tinggi dalam hal kemampuan kerjasama, organisasi, manajemen, dan kewirausahaan, meskipun memiliki sumber daya alam yang rendah, dapat memiliki daya saing nasional dan tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi kualitas sumber daya manusianya rendah (Sukri, 2003).

Boyolali adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Sebagai daerah agraris, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam perekonomian dan kehidupan masyarakat Boyolali. Letak geografis Kabupaten Boyolali sangat strategis, terletak di antara koordinat $110^{\circ}22'$ – $110^{\circ}50'$ BT dan $7^{\circ}36'$ – $7^{\circ}71'$ LS. Secara administratif, Boyolali berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang di utara; Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Sukoharjo di timur; Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta di selatan; serta Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang di barat. Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah 101.510,20 Ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 22.830,83 Ha dan tanah kering seluas 78.679,37 Ha. Secara topografis, wilayah Kabupaten Boyolali adalah dataran rendah dengan perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi berada di Kecamatan Selo dengan ketinggian 1.500 meter, sedangkan titik terendah berada di Kecamatan Banyudono dengan ketinggian 75 meter. Keberadaan Gunung Merbabu dan Gunung Merapi menjadikan tanah di Boyolali sangat subur, sehingga Boyolali menjadi salah satu lumbung pangan bagi Provinsi Jawa Tengah (BPS, 2020).

Tabel 1. 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2022

PRDB	PRDB Kabupaten Boyolali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4694143,28	4855860,57	4918349,13
2. Pertambangan dan Penggalian	821041,91	820702,21	840071,02
3. Konstruksi	1450097,34	1582422,47	1624673,15
4. Transportasi dan Pergudangan	648389,75	627826,30	1282557,76
5. Real Estate	294354,83	299429,01	315987,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali, 2023

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Boyolali, sektor pertanian merupakan sumber pendapatan terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Dari tahun ke tahun, PDRB sektor pertanian menunjukkan peningkatan, terbukti dari angka pada tahun 2020 sebesar Rp. 4.694.143,28, naik menjadi Rp. 4.855.860,57 pada tahun 2021, dan mencapai Rp. 4.918.349,13 pada tahun 2022. Kecamatan Simo, sebagai salah satu kecamatan di Boyolali, menjadi pusat produksi pertanian utama dan menempati peringkat pertama dengan luas panen padi sawah sebesar 4.425 hektar.

Tabel 1. 2 Luas panen padi sawah menurut kecamatan di Kabupaten Boyolali

No	Kecamatan	Padi Sawah
		2020
1.	Simo	4425
2.	Andong	4174
3.	Banyudono	3776
4.	Sawit	3739
5.	Karanggede	3613

Sumber: Statistik Dalam Angka Kecamatan Simo 2021

Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama, baik dari segi kontribusi terhadap pendapatan nasional maupun jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Namun, di banyak negara berkembang, prioritas pada sektor pertanian dalam kebijakan pembangunan ekonomi tidak selalu berujung pada peningkatan pendapatan petani. Hal ini disebabkan oleh kemiskinan struktural yang mendalam di sektor pertanian, sehingga pertumbuhan dari luar sering kali tidak direspon positif oleh petani dalam bentuk investasi (Sukri, 2003). Sejalan dengan hal ini, Desa Gunung di Kecamatan Simo merupakan wilayah dengan luas panen yang lebih rendah dibandingkan desa lainnya. Menurut statistik resmi dari badan penyuluh pertanian Kecamatan Simo, luas panen Desa Gunung pada tahun 2020 hanya 221 Ha, meskipun jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani jauh lebih besar dibanding desa lain.

Adanya potensi Sumber Daya Alam yang besar di Kabupaten Boyolali

didukung juga dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang berisi strategi dan kebijakan untuk melindungi dan memberdayakan petani. Tujuannya adalah menciptakan sinergi dan keberlanjutan produktivitas pertanian guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Kebijakan ini mencakup prasarana dan sarana produksi pertanian, kapasitas usaha, jaminan pemasaran hasil pertanian, ganti rugi gagal panen, sistem peringatan dini, asuransi pertanian, serta bantuan atau subsidi pertanian.

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Boyolali menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani, dan ketahanan pangan. Potensi sumber daya dari sektor pertanian harus dioptimalkan melalui strategi pembangunan, mengingat meningkatnya konsumsi produk pertanian. Untuk meningkatkan hasil pertanian berdasarkan potensi daerah, diperlukan dukungan dana dan personil yang mampu memberikan pemahaman kepada petani terkait proses hingga pasca produksi.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam sektor pertanian di Desa Gunung harusnya berdampak signifikan pada perkembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, wawancara dengan masyarakat Desa Gunung, khususnya petani, menunjukkan bahwa pemberdayaan di bidang pertanian masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan.

Pertama, terdapat keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam

mengembangkan potensi pertanian. Banyak petani kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen strategi pengelolaan lahan. Hal ini berdampak pada produktivitas lahan dan kesejahteraan petani. Tanpa pemahaman yang memadai, petani tidak dapat memaksimalkan potensi lahan, dan beberapa bahkan mengalami gagal panen.

Kedua, keterbatasan akses pasar bagi hasil pertanian. Petani mengalami kesulitan dalam menjual hasil panen mereka. Wawancara menunjukkan bahwa petani biasanya menggunakan hasil panen untuk kebutuhan sendiri dan menjual sisanya ke pasar. Namun, akses pasar yang terbatas menyebabkan pendapatan yang rendah, dan beberapa hasil panen dijual dengan harga rugi.

Ketiga, belum optimalnya pemerintah desa dalam menyediakan sarana dan prasarana produksi pertanian. Keterbatasan anggaran desa menghambat pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai. Kurangnya pemahaman tentang kebutuhan petani dan dinamika pertanian lokal mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak tepat. Rendahnya koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga terkait menghambat perencanaan dan implementasi proyek yang efektif. Akibatnya, petani mengalami kesulitan dalam mengakses sarana produksi, yang menurunkan produktivitas pertanian dan menghambat perkembangan sektor pertanian, berdampak negatif pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.

Keempat, ketidaksesuaian dukungan pemerintah dengan jenis bibit yang diberikan. Pemerintah memberikan bibit jamur kepada petani, namun berdasarkan wawancara, penanaman jamur dianggap kurang cocok di Desa Gunung. Hal ini menyulitkan petani untuk mengembangkan jamur sebagai produk utama. Oleh

karena itu, kebijakan harus memastikan bahwa jenis bibit yang diberikan sesuai dengan karakteristik lahan, sehingga petani dapat memanfaatkan program ini secara optimal.

Kelima, ketidakmerataan realisasi bantuan atau subsidi pupuk. Ketidakmerataan distribusi subsidi pupuk dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi di antara petani. Beberapa wilayah kesulitan memperoleh pupuk yang esensial, yang berdampak pada produktivitas tanaman dan hasil panen. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan di kalangan petani dan meningkatkan risiko konflik. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam distribusi pupuk guna mendukung pertanian yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, latar belakang pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Boyolali memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pemberdayaan petani dan sektor pertanian di wilayah tersebut. Ini juga memberikan pandangan tentang program-program yang telah dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian di Desa Gunung. Dengan menganalisis latar belakang pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Desa Gunung, kita dapat mengidentifikasi area-area potensial untuk perbaikan dan pengembangan dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Tani oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten

Boyolali dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah."

Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat tani di Desa Gunung ini dilakukan karena dapat membantu petani mendapatkan keuntungan lebih baik dari usaha pertanian mereka dan bisa melibatkan hal baru untuk mengajarkan keterampilan atau memberikan akses yang lebih baik ke sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga bisa membantu mengurangi perbedaan antara petani dalam hal pengetahuan dan peluang. Dengan begitu, penelitian ini membawa manfaat langsung kepada masyarakat tani, membantu mereka keluar dari kondisi sulit dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Diharapkan penelitian ini bisa membuat pertanian lebih baik untuk semua orang.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka identifikasi masalah yang dikemukakan oleh peneliti terkait beberapa pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut diantaranya yakni:

1. Pemberdayaan petani melalui regulasi dan kebijakan yaitu Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, namun Pemerintah Desa Gunung belum sepenuhnya menjalankan amanat dari peraturan tersebut.
2. Pemerintah Desa Gunung belum bisa membantu petani dalam mengakses

pasar, padahal hal tersebut bagian penting dari pemberdayaan petani untuk meningkatkan perekonomian.

3. Pemberdayaan melalui Pendidikan, seperti pelatihan masih sangat kurang, hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya sumber daya manusia yang terlatih dalam mengembangkan potensi di bidang pertanian.
4. Belum optimalnya pemerintah desa dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana produksi di bidang pertanian.
5. Kurangnya kesesuaian dukungan pemerintah desa dalam pemberian bibit unggul terhadap kecocokan kemampuan petani.
6. Realisasi bantuan atau subsidi pupuk yang belum merata.

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini yakni bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari apa yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah :

Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung,

Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah?

1.5 Tujuan Penulisan

Penelitian ini juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut untuk mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pegangan dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf

Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah, sehingga mampu mengoptimalkan kinerja dan mencapai tujuan yang di tetapkan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan informasi dan pemikiran bagi masyarakat atau pembaca.
- c. Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Gunung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali dalam menentukan keberlanjutan kebijakan.

2. Manfaat Teoritis.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah
- b. Mengetahui Pemberdayaan Masyarakat Tani Oleh Pemerintah Desa Gunung, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali Dalam Peningkatan Taraf Kesejahteraan Petani Berdasarkan Regulasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan Dan Pemberdayaan Masyarakat Tani Provinsi Jawa Tengah

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamid, Abdul dkk. 2021 *Book Chapter : Center of excellent for lokal food innovation*, Serang : Untirta Press
- Handayani, Risma. 2014. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alayuddiin University Press.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pusaka Ilmu Group
- Kurniawan, Borni. 2015. *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta Pusat : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- M. Nawas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Jakarta:Alfabeta.
- Pamudji, S. S. 2012. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2019.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah. Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Provinsi Jawa Tengah
- Rukminto, A.I. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.
- Siagian, SP. 2009. *Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi, dan*

Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara.

Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Medan:
Departemen Ilmu Kesejahteraan Ilmu Sosial FISIP USU.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman, Sunyoto. *Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta:
Prenada Media